

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alimudin Tuwu. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah. 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Sofyan dan Abdul Aziz. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Bambang Purnomo. 2001. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta.
- 1993. *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981*. Yogyakarta: Liberty.
- Bambang Waluyo. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2017. *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Press.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- 2000. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- 2011. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang: UNDIP.
- 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.

- 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- 2001. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dahlan Thaib. 1999. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: Liberty.
- Darmono. 2013. *Penyimpangan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Solusi Publishing.
- Dewi, DS. dan Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Pro Publishing.
- Djoko Prakoso. 1984. *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- 1978: *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- E.Y. Kanter dan Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Hari Sasongko. 1996. *Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan*. Surabaya: Dharma Surya Berlian.
- Heri Tahir. 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo.
- Indroharto. 2005. *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Laden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi. 2018. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Mandar Maju.
- , dan I.B. Wiyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Lilik Mulyadi. 2015. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Luhut M.P Pangaribuan. 2008. *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat: Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi.
- M. Faal. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi Dikresi Kepolisian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro. 1997. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI.
- , 2007, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Kelima. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Penerbit Chalia Indonesia.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Malawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- PAF Lamintang. 1984. *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.

- Peter mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R Soesilo. 1991. *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap*. Bogor: Politeia.
- RM. Surachman. 2017. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , dan Andi Hamzah. 1996. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , dan Jan S. Maringka. 2016. *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh. 1981. *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: CV Mandar Maju.
- 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Salman Luthan. 2014. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Satjipto Raharjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidik Sunaryo. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Binacipta.
- 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press.

- dan Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Press.
- Suratman Hayat dan Umami Salamah, 2009. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Refika. Bandung.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press.
- Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- TB. Ronny Rahman Nitibaskara. 2009. *Perangkap Penyimpangan Dan Kejahatan, Teori Baru Dalam Kriminologi*, Jakarta: YPKIK.
- T.J Gunawan. 2018. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Topo Santoso. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- 2009. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran.

JURNAL DAN MAKALAH

- Adam Prima Mahendra, Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 3, Nomor 4, 2020.
- Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Lex Renaissance*, Volume 7, Nomor 1, 2022.
- Ardilafiza, Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Konstitusi* Volume III Nomor 2 November 2010, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek system Peradilan Pidana), Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajement di

Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, salatiga, I Maret 20001.

Bayu Ardian Aminullah dan Barda Nawawi Arief, “Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia”, *Jurnal Meta-Yuridis* Vol 3, No 1, 2020.

Candra Ulfatun Nisa dan Nyoman Serikat Putra Jaya, Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 6 Nomor 1, 2020.

Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/Feb/2016.

Fetri A. R. Tarigan, Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses, *Jurnal Lex Crimen* Vol. 4, No. 5, Juli 2015.

I Kadek Darma Santosa, Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 1 Februari 2021.

John Kenedi, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), *Jurnal Al Imarah*, Vol. 2 Nomor 1 tahun 2017.

Lilik Prihatini, Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya dalam Perkara Pidana, *Jurnal Pakuwan Law Review*, Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni 2015.

Loebby Loqman, Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Semarang, 26-27 April 2004.

Michael Barama, Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III/No.8/Januari-Juni /2016.

Nyoman Satyayudhadananjaya, Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian, *Jurnal Vyavahara Duta*, Volume IX, No. 1, September 2014.

Sahat Maruli Tua Situmeang, Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Res Nulllius*, Vol. 1, 1 Januari 2019.

Sudaryono, Muhammad Iksan, dan Kuswardani Kuswardani, Model Penyelesaian Secara Alternatif Dalam Peradilan Pidana (Studi Khusus Terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Kepolisian), *Jurnal Penelitian Humaniora* Volume 13 tahun 2012.

Tolib Efendi, Re-Evaluasi Sistem Penuntutan Dalam KUHP, *Jurnal Media Hukum*, Volume 19, Nomor 1, Juni 2012.

WEBSITE

Bismar Nasution, *Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Mediasi*, disampaikan pada Dialog Interaktif “PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi di Pengadilan”, di akses pada tanggal 28 April 2024

<https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/>, diakses pada tanggal 29 April 2024 pukul 14.35 Wib.

<https://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pondahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/>, diakses pada tanggal 29 April 2024 pukul 11.39 Wib

Barda Nawai Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Artikel dalam <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penalpenyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/> 2009, diakses pada tanggal 9 September pukul 14.00 Wib.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Republik Indonesia 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Republik Indonesia 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67).

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XH/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).

Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

